

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2005-2015

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIRECT CASH (BLT) POLICY ON POVERTY IN INDONESIA 2005-2015 PERIOD

Ratna Dewi¹, Habib Furqony Andrianus²

¹Kementrian Agama Kota Padang

²Ilmu Ekonomi, FEM IPB

mama.betris@gmail.com, habibandrianus@gmail.com

ABSTRAK: Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan tunai. Bantuan ini pertama kali diberikan kepada masyarakat pada tahun 2005 dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan program bantuan langsung tunai, bagaimana kebijakan bantuan tersebut dilaksanakan, apakah berdampak pada kemiskinan dan bagaimana evaluasi program bantuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2005-2015 dengan menggunakan analisis dan korelasi kualitatif. Studi ini menemukan bahwa program bantuan tunai langsung berdampak pada kemiskinan di Indonesia, namun kebijakan program tersebut menuai protes karena penyaluran dan pencairannya dinilai membingungkan. Di sisi lain, program ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat daripada bantuan sosial berupa sembako, karena masyarakat dapat mengeluarkan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

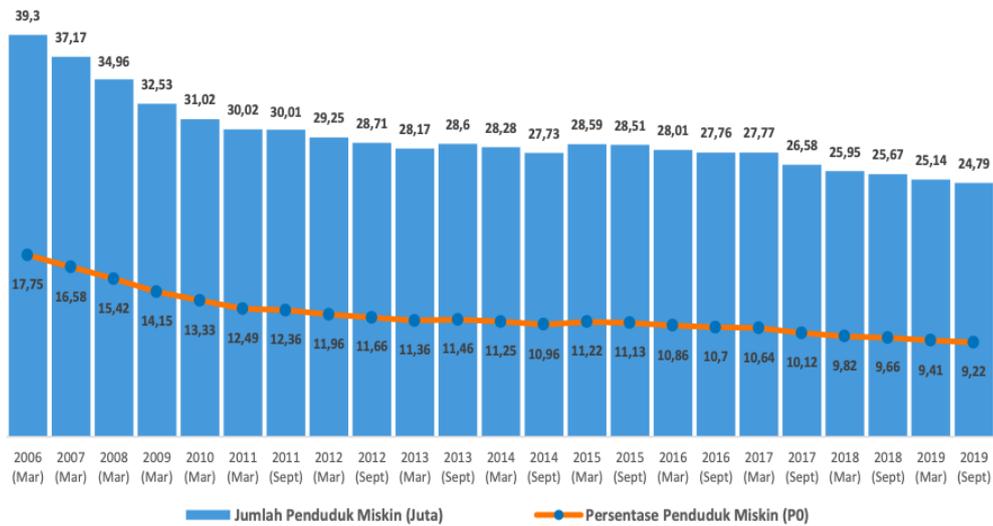
Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Program Bantuan Langsung Tunai,

ABSTRACT : *Poverty is a major problem in every country, especially in developing countries, including Indonesia. To reduce poverty, the government issued a policy in the form of a cash transfer program. This assistance was first given to the community in 2005 and can be used to meet their daily needs. With the direct cash transfer program, how will the aid policy be implemented, whether it has an impact on poverty and how is the evaluation of aid programs in Indonesia. This study uses secondary data from the Central Statistics Agency for the period 2005-2015 using qualitative analysis and correlation. This study found that the direct cash transfer program has an impact on poverty in Indonesia, but the program's policy has drawn protests because its distribution and disbursement is considered confusing. On the other hand, this program is considered to be more effective and efficient to provide to the community than social assistance in the form of basic necessities, because the community can spend funds for other needs besides food needs.*

Keywords: *Poverty Level, Direct Cash Assistance Program*

A. PENDAHULUAN

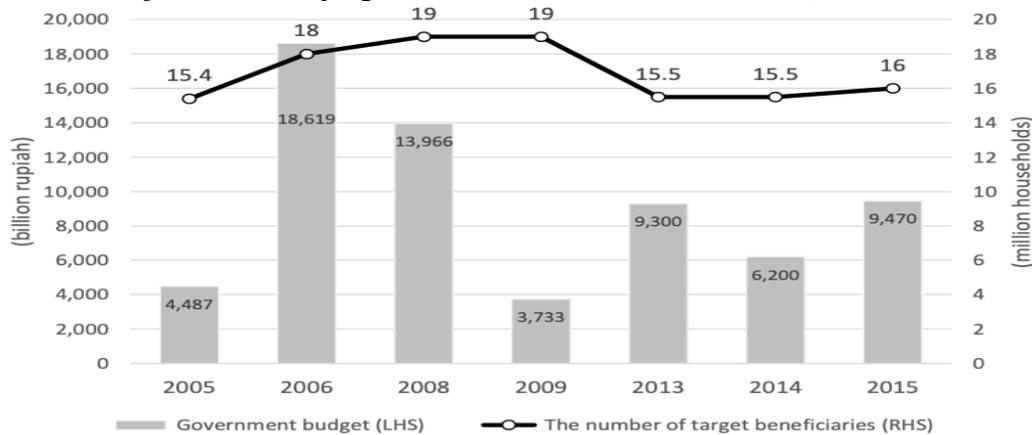
Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro 2002). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 2019). Secara umum, pada periode September 2006-2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini terlihat bahwa program Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya pada periode tersebut. Namun pada periode September 2013 dan Maret 2015 mengalami kenaikan, hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BPS 2019)



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, pada September 2006-2019

Sumber: BPS, 2019

Dalam menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 berupa kucuran bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya untuk mengurangi dampak dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada rumah tangga miskin (World Bank 2017). Program ini menargetkan 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia, yang mencakup sekitar 15 sampai 19 juta rumah tangga. Hal tersebut menjadikan program BLT menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia (Izzati *et.al.* 2020).



Gambar 2. Jumlah penerima bantuan langsung tunai dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya (2005-2015)

Sumber : Izzati *et.al.*,2020

Pada Gambar 2 terlihat anggaran untuk program ini sempat mengalami fluktuasi, tetapi jika dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan di Indonesia, angka tersebut secara umum terus menurun. Dengan adanya pogram Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah diprogramkan oleh pemerintah dapat menurunkan jumlah dan persentase angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga, pelaksanaan dan pengaruh dari program ini menarik untuk dianalisis dalam rangka upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Indonesia, bagaimana analisis dari pengaruh kebijakan BLT dalam menangani

kemiskinan di Indonesia dan bagaimana evaluasi kebijakan BLT di Indonesia pada periode 2005-2015.

B. TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi individu yang tidak mampu secara ekonomi dalam pemenuhan standar minimal kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum kemiskinan terbagi atas dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok paling minimal, antara lain sandang, pangan, perumahan dan lainnya. Kemiskinan relatif merupakan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan relatif akan selalu terjadi karena merupakan perbandingan antara tingkat kemiskinan individu dengan individu lainnya.

Lebih lanjut Ritonga (2003) menjelaskan kemiskinan merupakan kondisi yang serba tidak cukup (tidak layak) yang dialami individu. Kondisi tidak layak terjadi jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti yang dimaksud pada kemiskinan absolut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati *et.al.*, 2020).

Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, misal terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia.

Teori Konsumsi

Konsumsi diartikan sebagai sebuah fungsi yang menghubungkan konsumsi dengan pendapatan disposable (Mankiw 2006). Menurut Keynes, pendapatan disposibel merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi. Namun demikian ada juga konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan disposibel. Hal ini berarti walaupun pendapatan tidak ada konsumsi harus tetap ada. Konsumsi seperti ini disebut dengan konsumsi otonomi. Jika pendapatan disposibel naik maka konsumsi cenderung juga akan naik, namun kenaikan konsumsi tidak sama dengan kenaikan pendapatan, karena tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi..

Perilaku konsumsi digambarkan oleh Keynes dalam bentuk fungsi konsumsi, dengan persamaan sebagai berikut:

$$C = a + bY_d \dots\dots\dots (1)$$

dimana C menunjukkan konsumsi yang dilakukan masyarakat, a adalah konsumsi otonomi, b adalah kecenderungan mengkonsumsi (MPC) yaitu perbandingan peningkatan konsumsi dengan peningkatan pendapatan, Y_d adalah pendapatan disposable. Selain MPC ada juga MPS, yaitu kecenderungan menabung. MPS merupakan perbandingan peningkatan menabung akibat peningkatan pendapatan. MPC ditambah MPS nilainya adalah 1 (satu). Atau MPC -1 sama dengan MPS dan sebaliknya (Mankiw 2006).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dengan memperoleh dan menghimpun data-data yang diperlukan untuk penelitian dari literatur-literatur, dan dokumen yang terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 - 2015 di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi.

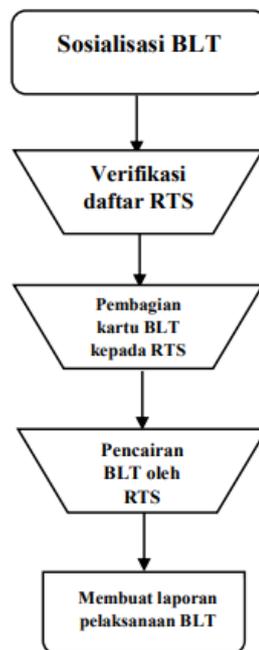
D. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan BLT di Indonesia

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Secara umum tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT di Kabupaten adalah:

1. Sosialisasi program BLT yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, aparat kecamatan dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, kader taruna siaga bencana (TAGANA), pekerja sosial masyarakat (PSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat).
2. Pengecekan kelayakan (verifikasi) daftar RTS di tingkat desa /kelurahan.
3. Pembagian kartu BLT kepada RTS oleh Petugas Pos dibantu aparat desa /kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
4. Pencairan dana BLT oleh RTS di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan untuk daerah-daerah yang terpencil /sulit menjangkau Kantor Pos.
5. Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

Tahapan penyaluran dana BLT dalam diagram alir dapat dilihat, sebagai berikut :



Gambar 3. Diagram Alir Penyaluran Dana BLT

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020

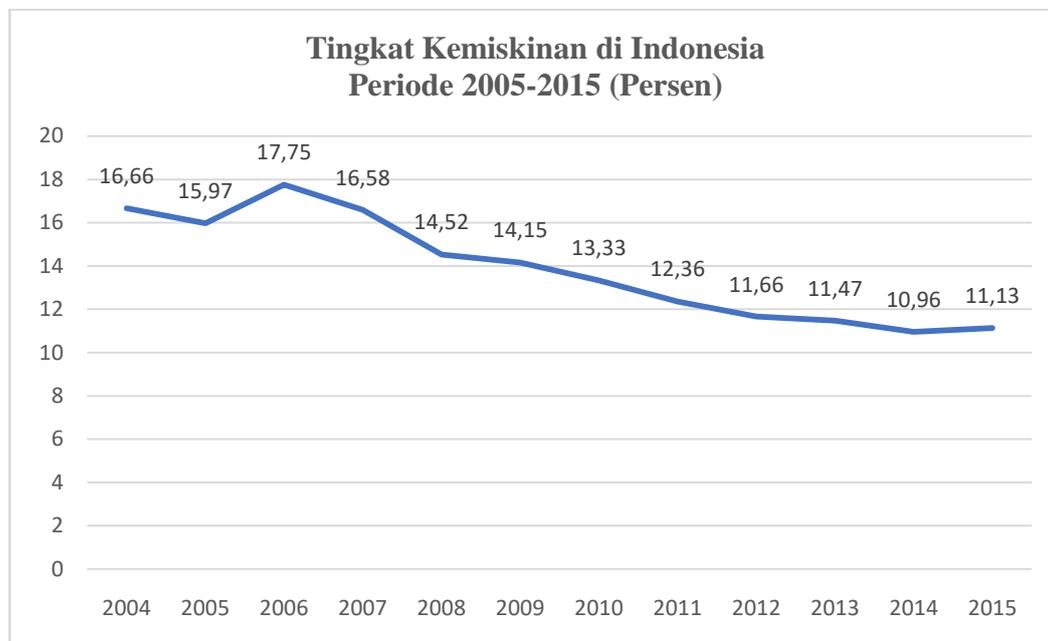
Pada tahun 2005 – 2006, Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005. Program pemberian BLT tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah

tangga miskin. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program ini bersifat temporer, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong menguatnya *the culture of poverty*. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterimakan per triwulan sebesar Rp 300.000,-. (Lembaga Penelitian SMERU 2011)

Pada tahun 2008, kenaikan harga minyak mentah dunia semakin tajam. Hal tersebut membuat pemerintah akhirnya kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 (Inpres 3/2008) tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program BLT ini memberikan Rp 100.000,- per bulan dimulai pada bulan Juni berakhir di bulan Desember tahun 2008, selama tujuh bulan. Sasaran dari program ini adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejumlah 19,1 juta di seluruh Indonesia. (Iqbal 2008)

Pengaruh Kebijakan BLT dalam menangani kemiskinan di Indonesia

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai dana desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.



Gambar 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2016(diolah)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,84%, meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2006 dan 2015. Setelah diberlakukannya BLT pada tahun 2005, tingkat kemiskinan terbukti menurun. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2006. Hal tersebut dipengaruhi oleh peristiwa melambungnya harga BBM yang berpengaruh pada peningkatan harga kebutuhan pokok. Kemudian, program BLT yang dilaksanakan pada tahun 2008 terbukti lebih memberikan pengaruh yang cukup besar pada penurunan tingkat kemiskinan.



Gambar 5. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2005-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Fluktuatif terbesar terjadi ketika tahun 2005-2009, namun tidak begitu signifikan pada tahun 2010-2015 (y on y). Meskipun begitu, secara keseluruhan persentase laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Oleh karena itu, dapat dikatakan Bantuan Langsung Tunai memiliki kontribusi dalam mempengaruhi pertumbuhannya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia meskipun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di luar Bantuan Langsung Tunai.

Dalam pelaksanaannya, program BLT secara langsung berdampak terhadap peningkatan kemampuan beli masyarakat miskin dan berdampak juga kepada pengelolaan dana yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan minimal setiap hari. Bantuan Langsung Tunai juga berdampak terhadap apresiasi masyarakat miskin terhadap program pemerintah untuk membantu dan meringankan beban rumah tangga miskin. Sehingga dengan adanya bantuan ini masyarakat miskin terbantu dan pemerintah juga bisa merealisasikan satu program pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin baik.

Dengan adanya program BLT ini akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Dimana dengan menggunakan uji korelasi terdapat hubungan antara pengeluaran konsumsi dan tingkat kemiskinan setelah adanya BLT di Indonesia.

Tabel 1. Hasil Korelasi

		Konsumsi	Tingkat Kemiskinan
Konsumsi	Pearson Correlation	1	-0.682*
	Sig. (2-tailed)		0.021
	N	11	11
Tingkat kemiskinan	Pearson Correlation	-0.682*	1
	Sig. (2-tailed)	0.021	
	N	11	11

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data diatas nilai signifikansi antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat kemiskinan setelah adanya BLT adalah sebesar $0.021 < 0.05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat kemiskinan setelah adanya BLT di Indonesia. Dengan demikian semakin meningkat tingkat kemiskinan maka akan semakin meningkat pengeluaran konsumsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperbaiki angka kemiskinan di Indonesia. Melalui Program BLT masyarakat di dorong untuk bertanggung jawab mengelola dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes dari masyarakat karena dalam penyaluran dan pencairannya dirasa membingungkan. Selain itu program Bantuan Langsung Tunai dana desa ini berdampak langsung kepada perilaku dan karakter masyarakat penerima yang berfikir bahwa dana yang di berikan dapat di gunakan untuk keperluan lain yang tidak berguna seperti membeli rokok, atau dana disalahgunakan dalam bentuk lain.

Evaluasi Kebijakan BLT di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, program BLT memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari adanya program Bantuan Langsung Tunai yaitu lebih bermanfaat karena masyarakat penerima manfaat BLT dapat mengelola sendiri uang bantuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian Harwidiensyah (2011), dibandingkan dengan bantuan sosial dalam bentuk sembako, masyarakat miskin merasa BLT lebih bermanfaat karena bisa mengelola dana untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penelitian tersebut mewawancarai beberapa narasumber penerima BLT dan diketahui selain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, uang BLT yang mereka peroleh dapat mereka jadikan sebagai tambahan modal usaha. Selain itu, uang hasil BLT juga dapat menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal akibat adanya kenaikan BBM. Disamping membantu meminimalisir dampak kenaikan BBM terhadap rakyat miskin, adanya program BLT juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam memperhatikan Rumah Tangga Sasaran.

Namun, selain kelebihan, program BLT pun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang paling utama dalam pelaksanaan program BLT di Indonesia yaitu masih banyak daerah yang belum update database. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Hal tersebut menyebabkan program ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Selain update database yang masih kurang, permasalahan program BLT juga terletak pada penyalurannya dimana pemberi bantuan sulit menyalurkan dana BLT ke daerah terpencil karena akses dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, masih lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut membuat efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi.

Peran aktif masyarakat pun dinilai masih kurang, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Di samping dalam pelaksanaannya, program BLT juga dapat memberikan dampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Menurut Nurmiza (2015), Adanya bantuan kepada masyarakat akan membuat masyarakat tidak mandiri serta mendidik masyarakat untuk selalu mengharapakan bantuan dari pemerintah. Adanya kecemburuan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang tingkat perekonomiannya sama, satu pihak menerima BLT sedangkan satu pihak lainnya tidak menerima BLT. Kecemburuan terjadi ketika pihak yang tidak menerima program merasakan iri dengan pihak yang menerima BLT.

Kesimpulan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2006-2019) tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada periode Maret 2006 sampai periode September 2019 sebesar 29,35 persen, kecuali pada periode September 2013 terjadi peningkatan sebesar 28,6 persen lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar 28,17 persen dan Maret 2015 sebesar 28,59 persen lebih tinggi dari

periode September 2014 yaitu sebesar 27,73 persen. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan program BLT menuai banyak protes karena dalam penyaluran dan pencairannya dirasa membingungkan. Program ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin dikarenakan program ini hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Namun, di sisi lain BLT atau bantuan langsung tunai dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat dibandingkan dengan bantuan sosial dalam bentuk sembako, karena masyarakat dapat membelanjakan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

Rekomendasi

Terkait dengan program BLT tersebut, maka disarankan:

1. Penyaluran dana BLT, sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui tata cara pencairan dana tersebut.
2. Program BLT sebaiknya lebih tepat sasaran, dengan data yang harus diperbarui setiap triwulan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
3. Pengawasan dalam penyaluran BLT sebaiknya lebih ditingkatkan, supaya dana BLT dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu kepada masyarakat.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa dana BLT digunakan untuk kebutuhan paling mendesak atau kebutuhan penting bukan untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Todaro, M. P. (2002). *Economic development*. Pearson Education India.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (2019). Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019.
- World Bank (2017) 'Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review Update: Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia.' Washington, D.C.: World Bank.
- Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). The Behavioral Effects of Unconditional Cash.
- Ritonga, H. (2003). Perhitungan Penduduk Miskin. *BPS. Jakarta*.
- Mankiw N, Gregory. 2006. Makro Ekonomi, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 195
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2020. Pengutamaan Penggunaan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Ringkasan Kebijakan* [internet]. [diunduh 12 Des 2020].
- Lembaga Penelitian SMERU. 2011. Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerimaan Program BLT 2005 di Indonesia. Laporan Penelitian [internet]. [diunduh pada 14 Des 2020].
- Harwidiyansyah. 2011. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baju Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Skripsi* [Internet]. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makassar: Makassar. [Diakses 11 Des 2020]. <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10793/>>
- Nurmiza. 2014. Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. *Skripsi* [internet]. [diakses 11 Des 2020]. <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/05/Naskah-Publikasi-Nurmiza.pdf>